BAB II

TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA PEMIKIRAN

2.1 Tinjauan Pustaka

2.1.1 Hubungan Internasional

Secara konseptual Hubungan Internasional bermula saat manusia tinggal menetap di suatu daerah dan membentuk diri mereka sendiri di dalam wilayah terpisah dengan berdasarkan komunitas politik. Setiap komunitas politik yang terbentuk tidak bisa menghindari terjadinya kontak dengan komunitas lainnya. Interaksi yang terjadi antar komunitas yang ada menimbulkan efek yang saling mempengaruhi. Realitas politik kontemporer menunjukan bahwa seluruh populasi dunia terbagi ke dalam komunitas-komunitas wilayah politik, atau negara mereka, yang sangat berpengaruh terhadap bentuk kehidupan mereka. Selanjutnya negara-negara tersebut membentuk suatu sistem internasional.

Hubungan Internasional adalah ilmu yang mempelajari segala macam bentuk hubungan antar negara, bangsa, antar pemerintah, dan antar individu yang melintasi batas antar negara. Hubungan Internasional merupakan bentuk interaksi antara aktor atau anggota masyarakat yang satu dengan anggota masyarakat yang lain. Perwita dan Yani mendefinisikan Hubungan Internasional sebagai studi tentang interaksi antara jenis-jenis kesatuan-kesatuan sosial tertentu, termasuk studi tentang keadaan-keadaan relevan yang mengelilingi interaksi (Perwita dan Yani, 2005 : 4).

Hubungan internasional bersifat sangat kompleks, karena didalamnya terdapat bermacam-macam bangsa yang memiliki kedaulatan masing-masing. Sehingga memerlukan mekanisme yang lebih menyeluruh dan rumit dari pada hubungan antar kelompok manusia di dalam suatu negara. Tujuan utama studi Hubungan Internasional adalah mempelajari perilaku internasional, yaitu perilaku aktor negara yakni pemerintah maupun aktor non-negara seperti organisasi internasional dan individu. Perilaku tersebut dapat berwujud perang, konflik, kerjasama, pembentukan aliansi, interaksi dalam organisasi internasional, dan lain-lain. Pola interaksi dalam hubungan internasional bisa menjadi hubungan kerjasama, persaingan, dan konflik, sekarang ini tentu dunia lebih menekankan pada pola-pola kerjasama. Seperti bagaimana meningkatkan kerjasama antar negara dan juga mengubah persaingan dan konflik menjadi kerjasama (Rudy, 2003 :2).

Terjadinya Hubungan Internasional merupakan suatu keharusan sebagai akibat adanya saling ketergantungan dan bertambah kompleksnya kehidupan manusia dalam masyarakat internasional sehingga interdepensi tidak memungkinkan adanya suatu negara yang menutup diri terhadap negara lain. Dengan demikian, harapan untuk masa kini dan dan yang akan datang pada interaksi Hubungan Internasional lebih pada kerjasama antar negara.

2.1.2 Kerjasama Internasional

Berbagai masalah baik nasional, regional maupun global saling bermunculan yang memerlukan perhatian dari berbagai negara dan telah

merupakan kecenderungan yang kuat dewasa ini. Banyak kasus memperlihatkan bahwa pemerintah saling melakukan hubungan, mengadakan perundingan untuk mencari pemecahan masalah yang mereka hadapi dan biasanya perundingan diakhiri dengan membentuk perjanjian atau saling pengertian yang memuaskan bagi semua pihak. Proses semacam itu membentuk apa yang disebut dengan kerjasama (*cooperation*). Suatu negara tidaklah dapat berjalan tanpa ada hubungan negara lain. Bantuan dan kerjasama dengan negara lain pastilah dibutuhkan. Bentuk kerjasama dapat berupa kerja sama di bidang politik, ekonomi, sosial, pendidikan, pertahanan, keamanan, dan sebagainya. Tujuannya pun berbeda-beda bagi setiap negara, salah satu diantaranya adalah untuk meningkatkan kegiatan ekonomi sehingga pertumbuhan dan pembangunan ekonomi sehingga pertumbuhan dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dari kenyataan itu menunjukan perlunya kerjasama dengan negara lain (Tambunan, 2000 : 45).

Kusuma Atmaja mengatakan bahwa hubungan dan kerjasama antar bangsa muncul karena tidak meratanya pembagian kekayaan alam dan perkembangan industri di seluruh dunia sehingga terjadi saling ketergantungan antara bangsa yang berbeda. Karena hubungan dan kerjasama ini terjadi terus menerus, sangatlah penting untuk memelihara dan mengaturnya sehingga bermanfaat dalam pengaturan khusus sehingga tumbuh rasa persahabatan dan saling peduli antar bangsa di dunia (Rudy, 2002 : 12).

Dalam suatu kerjasama internasional bertemu berbagai macam kepentingan dari berbagai negara dan bangsa yang tidak dapat dipenuhi di dalam

negerinya sendiri. Kerjasama internasional adalah sisi lain dari konflik internasional yang juga merupakan salah satu aspek dalam Hubungan Internasional. Isu utama dari kerjasama internasional yaitu pada sejauh mana keuntungan bersama yang diperoleh melalui kerjasama dapat mendukung konsepsi dari kepentingan tindakan yang unilateral dan kompetitif. Kerjasama internasional terbentuk karena berbagai bidang seperti idiologi, politik, ekonomi, sosial budaya, lingkungan hidup, pertahanan dan keamanan. Dari berbagai masalah tersebut maka berbagai negara membentuk suatu kerjasama internasional (Perwita dan Yani, 2005:33).

2.1.3 Konsep Peranan

Konsep peranan menegaskan bahwa perilaku politik adalah perilaku dalam menjalankan peranan politik. Teori ini berasumsi bahwa sebagian besar perilaku politik adalah akibat dari tuntutan atau harapan terhadap peran yang kebetulan dipegang oleh aktor politik. Seseorang yang menduduki posisi tertentu diharapkan akan berperilaku tertentu pula. Harapan itulah yang membentuk peranan. Peranan memiliki dua arti, setiap orang mempunyai macam-macam peranan yang berasal dari pola-pola pergaulan hidupnya (Perwita dan Yani,2005:30).

Menurut Mochtar Mas'oed dalam buku yang berjudul Pengantar Hubungan Internasional karangan Anak Agung Banyu Perwita dan Yanyan Mochamad Yani bahwa:

> "Peranan (*role*) adalah prilaku yang diharapkan akan dilakukan oleh seseorang yang menduduki suatu posisi. Ini adalah perilaku yang dilekatkan pada posisi tersebut, diharapkan berperilaku sesuai dengan sifat posisi tersebut" (Perwita dan Yani, 2005:30).

Peranan yang melekat dalam diri individu harus dibedakan dengan posisi dalam pergaulan kemasyarakatan. Posisi seseorang dalam masyarakat merupakan unsur statis yang menempatkan individu pada organisasi masyarakat.

Struktur yang terdapat dalam organisasi memiliki fungsi-fungsi yang harus mereka jalankan agar tercapai tujuan dari pembentukan organisasi tersebut, dan apabila semua fungsi tersebut telah dijalankan dengan baik maka organisasi tersebut dapat dikatakan telah menjalankan peranan. Peranan tersebut selain ditentukan oleh pelaku peran tersebut juga ditentukan oleh harapan pihak lain, termasuk juga kemampuan, keahlian, serta kepekaan pelaku peran tersebut terhadap tuntutan dan situasi yang mendorong dijalankannya peranan. Peranan juga bersifat dinamis, dimana dia akan menyesuaiankan diri terhadap kedudukan yang lebih banyak agar kedudukannya dapat diakui oleh masyarakat (Soekanto, 2001:221).

2.1.3.1 Konsep Peranan Nasional

Peranan nasional juga merupakan posisi yang diambil atau dijalankan. Hubungan antara unit-unit nasional dalam sistem internasional tidak dapat dipahami hanya dengan melihat tindakan yang dilakukannya seperti pengiriman surat atau pernyataan perang. Pemerintah negara menyadari hubungan mereka dengan lingkungan itu lebih luas dari sekedar pertimbangan kondisi tertentu yang mempengaruhi mereka. Perlu ada sikap atau posisi yang disebut peranan.

Dua komponen kebijakan luar negeri yang merefleksikan pertimbangan tersebut ialah orientasi dan peranan. Kedua komponen ini dapat menjelaskan

mengapa suatu negara beserta pemerintahannya menjalin hubungan dengan dunia luar. Dari jalinan hubungan ini dapat terlihat prilaku dasar dan kebutuhan nasional yang bermain di dalamnya juga kondisi eksternal yang melingkupinya.

Menurut Holsti dalam Rudy, ada 16 tipe peranan nasional yang menjadi komponen luar negeri suatu negara. Tipe-tipe peranan itu, antara lain (Rudy, 2002:144) :

1. *Bastion of the Revolution, liberator*: Beberapa pemerintah merasa mempunyai tugas untuk mengorganisasikan atau memimpin berbagai gerakan revolusi di luar negeri. Salah satu tugas yang diembannya menurut mereka ialah untuk membebaskan pihak lain atau bertindak sebagai pelindung gerakan revolusi asing, yaitu dengan menyediakan tempat yang dapat dianggap sebagai dukungan fisik maupun moral oleh para pemimpin revolusi dan juga sebagai pengilham ideologi. Pidato-pidato politik luar negeri Cina banyak yang mengindikasikan peranan internasional seperti itu. Hal seperti itu banyak ditemui pada pidato para pemimpin negara baru merdeka (Rudy, 2002:144).
2. *Regional leader*: Tema dalam peranan ini merujuk pada tugas atau tanggung jawab khusus yang didasari oleh sebuah negara dalam hubungannya dengan negara-negara lain di kawasan yang sama. Tema ini nampak jelas dalam pidato Mesir tentang posisinya di Timur Tengah, juga pada konsep Amerika Serikat akan tugas internasionalnya (Rudy, 2002:144).

3. *Regional Protector:* Walaupun nampaknya peran ini mengimplikasikan tanggung jawab kepemimpinan tertentu dalam sebuah kawasan atau *issue area*, peranan ini menekankan pentingnya pemberian perlindungan bagi kawasan sekitarnya. Konsep peranan ini rutin dinyatakan dalam pidato politik luar negeri Australia, New Zealand, Uni Soviet, Inggris Raya, dan Amerika Serikat (Rudy, 2002:144).
4. *Active Independent*: Kebanyakan pernyataan pemerintah yang mendukung strategi non-blok tidak lebih hanya berupa penegasan peran 'kemerdekaan' dalam politik luar negeri. Beberapa negara mengatakan bahwa kemerdekaan tidak hanya mengimplikasikan isolasi ataupun keacuhan. Tema dalam peran ini menekankan pentingnya peningkatan keterlibatan mengenai hubungan diplomatik dengan negara-negara lain sebanyak mungkin dan biasanya bertindak sebagai penengah dalam konflik antar blok. Peranan ini sering ditemukan pada pernyataan politik luar negeri Yugoslavia, India, Perancis, Indonesia, Malaysia, Rumania, dan Turki dalam periode tertentu (Rudy, 2002:144).
5. *Liberation Supporter:* Tidak seperti peran *Bastion of the Revolution*, peran ini tidak mengindikasikan tanggung jawab formal untuk mengorganisasi, memimpin atau mendukung secara fisik gerakan kemerdekaan di luar negeri. Kebanyakan negara belum berkembang menempatkan dirinya sebagai pendukung gerakan kemerdekaan atau anti kolonialisme di luar negeri. Mereka adalah simpatisan gerakan-gerakan ini. Maka dalam

pertemuan di Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mereka biasanya mengambil sikap anti kolonialisme (Rudy, 2002:144).

6. *Anti-imperialist Agent*: Dimana imperialisme dilihat sebagai ancaman serius, banyak negara memandang dirinya sebagai 'agen' dalam perjuangan melawan imperialisme. Uni Soviet, Cina, Syria, Vietnam Utara, dan Rumania adalah negara-negara yang bertindak sebagai agen anti imperialism (Rudy, 2002:144).
7. *Defender of the Faith*: Beberapa pemerintah memandang kebijakan luar negerinya dalam *term* nilai-nilai pelindung (tapi tidak dalam batas wilayah tertentu) dari serangan. Presiden John F. Kennedy dalam pidatonya inauguralnya (1960), misalnya, menyatakan bahwa Amerika Serikat akan "membayar berapapun, membawa beban seberat apapun, menghadapi segala rintangan, mendukung teman atau melawan semua musuh untuk memastikan bertahannya dan berhasilnya kemerdekaan" (Rudy, 2002:144).
8. *Mediator-integrator*: Beberapa pemerintahan kontemporer memandang dirinya mampu atau bertanggungjawab untuk memenuhi atau menjalankan tugas sebagai penengah untuk menyelesaikan masalah di negara lain. Mereka menganggap dirinya sebagai penyelesai masalah di kawasan regional maupun global. Pernyataan seperti itu biasanya datang dari Kanada, Perancis, Rumania, Amerika dan Yugoslavia (Rudy, 2002:144).
9. *Regional-subsystem collaboration*: Tema peranan ini berbeda dari peran mediator-integrator karena peran ini tidak menghadapi konflik yang sama.

Peran ini mengindikasikan komitmen yang lebih jauh terhadap kerjasama dengan negara lain untuk membangun masyarakat luas yang bersatu, bekerjasama, dan berintegrasi dengan berintegrasi dengan unit politik lainnya. Hal-hal seperti ini biasa ditemukan pada negara-negara Eropa (Rudy, 2002:144).

10. *Developer*: Tema dalam peranan ini mengindikasikan tugas atau kewajiban tertentu untuk membantu Negara-negara berkembang. Untuk menjalankan peranan seperti ini dibutuhkan kemampuan atau kelebihan tertentu. Kebanyakan negara industri, baik di barat maupun di timur, merasa inilah tugas regional atau internasional mereka (Rudy, 2002:144).
11. *Bridge*: Peran ini biasanya muncul dalam bentuk yang unik, dan nampaknya tidak, menstimulir tindakan tertentu. Contohnya Indonesia memprakarsai *Jakarta Informal Meeting*, lalu menengahi pertikaian Filipina-Moro (*Moro National Leberation Front*), sebagai penyambung lidah atau jembatan antara negara lain. Peranan ini biasanya tidak berlangsung lama, hanya ad-hoc saja (Rudy, 2002:144).
12. *Faithful ally:* Yang dimaksud dengan *faithful ally* ialah, bila pembuat kebijakan suatu negara menyatakan bahwa mereka akan mendukung sekutu (*fraternal ally*) mereka dengan segala cara. Mereka tidak terlalu mengharapkan bantuan dari luar seperti yang mereka berikan pada pihak lain (Rudy, 2002:144).
13. *Independent:* Peran ini dijalankan oleh sebagian besar para pemimpin negara di dunia. Mereka hanya menyatakan dalam keadaan apapun,

pemerintah mereka akan mengejar kepentingan mereka, jika tidak mereka tidak akan bertindak atau menjalankan fungsi apapun dalam sistem internasional. Kebanyakan negara-negara kecil yang tidak banyak terlibat dalam kancah politik dunia yang mengklaim peran ini (Rudy, 2002:144).

14. *Example* (keteladanan): Peran ini menekankan pentingnya mempromosikan *prestise* dan mempunyai pengaruh dalam sistem internasional dengan cara menjalankan kebijakan dalam negeri tertentu. Ia menjadi contoh (teladan) bagi negara-negara lain (Rudy, 2002:144).
15. *Internal development:* Konsep peranan ini tidak merujuk pada tugas atau fungsi tertentu dalam sistem internasional tetapi pada kesadaran bahwa kepentingan negara adalah membangun negaranya sendiri. Peran ini juga menyiratkan rendahnya partisipasi dalam politik internasional (Rudy, 2002:144).
16. *Other role*: Peranan ini mengimplikasikan adanya sumber-sumber lain yang melatarbelakangi tindakan suatu negara dalam politik luar negerinya selain yang telah disebutkan diatas (Rudy, 2002:144).

2.1.4 Bantuan Luar Negeri

Bantuan luar negeri merupakan salah satu instrumen kebijakan yang sering digunakan dalam hubungan luar negeri (Perwita dan Yani, 2005:81). Banyak ahli yang mendefinisikan bantuan luar negeri ini diantaranya Robert Giplin dalam bukunya " *The Political Economy of International Relation*", yakni bantuan luar negeri diartikan sebagai jumlah dana yang diberikan oleh negara yang relatif maju

atau kaya kepada negara yang secara ekonomi lebih miskin. K.J Holsti dalam bukunya *International Politics : Framework of Analysis*, mengartikan bantuan luar negeri sebagai transfer uang, teknologi, ataupun nasihat-nasihat teknis dari negara donor ke negara penerima. Menurut Holsti bantuan asing atau bantuan luar negeri merupakan pemindahan dana, barang, atau nasehat teknis dari suatu negara donor kepada negara penerima yang merupakan suatu sarana kebijakan yang telah digunakan dalam hubungan luar negeri selama berabad-abad. Jadi bantuan luar negeri merupakan *transfer* sumber daya dari satu pemerintah ke pemerintah lain yang dapat berbentuk dana, barang maupun nasehat teknis (Ikbar, 2007:187).

Bantuan luar negeri dapat juga diartikan sebagai tindakan-tindakan negara, masyarakat (penduduk), atau lembaga-lembaga masyarakat atau lembaga-lembaga lainnya yang berada pada suatu negara tertentu ataupun pasar tertentu diluar negeri, memberikan bantuan berupa pinjaman, memberi hibah atau pula penanaman modal mereka kepada pihak tertentu di negara lainnya (Ikbar, 2007:187).

Bantuan Luar negeri umumnya tidak ditujukan unuk kepentingan politik jangka pendek melainkan untuk prinsip-prinsip kemanusian atau pembangunan ekonomi jangka panjang, dalam jangka panjang bantuan luar negeri dimaksudkan untuk membantu menjamin beberapa tujuan politik negara donor yang tidak dapat dicapai hanya melalui diplomasi, propaganda atau kebijakan publik.

Pearson & Payaslian dalam buku Anak Agung Bayu Perwita, Yayan Mochamad Yani mengajukan empat teori mengenai bantuan luar negeri salah satunya adalah aliran moralis/idealis. Menurut aliran moralis/idealis bantuan luar

negeri secara esensial merupakan gerakan kemanusiaan yang menunjukan nilai-nilai kemanusiaan internasional (Perwita dan Yani, 2005:82).

2.1.4.1 Bentuk-Bentuk Bantuan Luar Negeri

Sedangkan bentuk-bentuk bantuan luar negeri menurut Holsti yaitu :

1. Bantuan teknis berupa pengiriman personil dengan kualifikasi khusus dari negara industri kepada negara berkembang yang terbelakang, untuk memberikan nasehat kepada berbagai proyek dengan maksud menyebarkan pengetahuan dan keahlian
2. Hibah dan program impor komoditas berupa hadiah langsung dimana pembayaran kembali secara ekonomi tidak diminta
3. Pinjaman pembangunan berupa transaksi komersial dengan syarat pembayaran kembali dan tingkat pinjaman suku bunga pinjaman yang lebih rendah dibandingkan dengan institusi perbankan komersial.
4. Bantuan kemanusiaan darurat berupa sumbangan dana dan tenaga kerja untuk menolong negara penerima yang sedang mengalami bencana.

Dalam penelitian ini Peneliti akan lebih fokus pada tipe pemberian bantuan hibah dalam rangka bantuan teknis. Hibah merupakan segala bentuk penerimaan negara baik devisa atau devisa yang dirupiahkan maupun dalam bentuk barang dan jasa. Bentuk penerimaan termasuk bantuan tenaga ahli dan pelatihan yang dibiayai oleh dana hibah itu sendiri. Dan pemberian bantuan dalam bentuk hibah tidak perlu dibayar kembali kepada negara pemberi hibah.

Bantuan luar negeri yang diberikan negara donor kepada negara penerima salah satunya dapat berbentuk hibah. Ada beberapa indikator dalam pemberian dana hibah, indikator tersebut dikelompokkan menjadi :

1. Hibah Menurut Skema dan Bentuknya

    a) Hibah dalam bentuk *cash*

Hibah ini sangat terbatas dan diberikan kepada negara-negara yang sangat miskin (pendapatan per kapita per tahun kurang dari USD 200). Tujuannya untuk memperbaiki neraca pembayaran negara-negara tersebut. Indonesia pernah dua kali menerima hibah dalam skema ini meskipun pada saat menerimanya tidak tergolong sebagai negara sangat miskin. Cara penarikan dana hibah tersebut dengan menunjukkan bukti impor atas komoditas yang eligible sesuai kesepakatan dengan pemberi hibah (Ariandi,2001).

b) Hibah dalam bentuk barang dan jasa dalam rangka bantuan proyek (*project assistance*) atau kerjasama keuangan (*financial cooperation*):

1. Hibah dalam bentuk barang dan jasa yang berdiri sendiri Secara mudah dapat dikatakan dalam skema ini sama dengan pinjaman luar negeri untuk proye-proyek pembangunan (pengadaan barang dan jasa). Yang membedakan adalah sumber dana dalam skema ini tidak perlu dikembalikan
2. Hibah dalam bentuk barang dan jasa untuk mendukung atau sebagai bagian *project assistance* yang dibiayai pinjaman. Hibah seperti ini berupa dana dan diberikan bersama-sama

dengan pinjaman untuk pembiayaan suatu proyek pengadaan barang dan jasa (Ariandi,2001).

c) Hibah dalam rangka bantuan teknik (*technical assistance*) atau kerjasama teknik (*technical cooperation*) seperti :

1. Hibah untuk mendukung proyek-proyek yang dibiayai pinjaman. Hibah bentuk ini berupa studi untuk persiapan, apprisial ataupun monitoring proyek-proyek pengadaan barang dan jasa yang dibiayai pinjaman. Dalam hal ini pihak pemberi dana menyediakan tenaga ahli dan dan membiayai seluruh kegiatan yang dilakukan tenaga ahli tersebut. Pihak penerima hibah hanya memfasilitasi kegiatan tenagatenaga ahli tersebut dan menerima hasil studi apprisial dan *monitoring* (Ariandi,2001).

2. Hibah dalam rangka *technical assistance* yang berdiri sendiri:

Hibah dalam skema ini pada dasarnya berupa penyediaan tenaga ahli dan atau konsultan untuk melaksanakan suatu proyek atau kegiatan tertentu. Lingkup pekerjaan konsultan berbeda-beda bergantung pada jenis proyek/kegiatan dan kontrak yang mengikatnya.

Hibah bentuk inilah yang lazim diberikan oleh semua negara dan lembaga donor. Dalam skema ini dimungkinkan adanya pengadaan barang namun sifatnya hanya pendukung pekerjaan tenaga ahli seperti pengadaan mobil, mesin *fotocopy* dan peralatan kerja lainnya. semua pembayaran tenaga ahli dilakukan semuanya oleh pihak donor. Penerima hibah umumnya hanya

menyediakan fasilitas pendukung seperti ruang kantor, personnalia pendamping, kendaraan agar tenaga ahli tersebut dapat bekerja dengan baik (Ariandi,2001).

3. Beasiswa dan pendidikan

   Bentuk hibah untuk yang juga lazim diberikan adalah beasiswa untuk studi bergelar maupun non-gelar didalam maupun diluar negeri, pelatihan ataupun magang dinegara donor, serta pertukaran pemuda. Masalah administrasi keuangan dikelola langsung oleh negara atau lembaga pemberi hibah.

4. Hibah dalam rangka bantuan kemanusiaan

   Hibah ini sifatnya lebih merupakan bantuan darurat. Hibah yang diberikan berupa bahan esensial yang sangat diperlukan seperti pangan, obat-obatan atau selimut serta ada kalanya uang tunai (Ariandi,2001).

2. Hibah menurut peruntukannya dan penyalurannya

   a. Hibah untuk pemerintah (*government to government*)

      Hibah jenis ini adalah hibah dalam berbagai skema diatas yang diperuntukkan bagi proyek-proyek pemerintah atau kegiatan-kegiatan dalam rangka program atau proyek pemerintah dan umumnya dilaksanakan oleh instansi-instansi pemerintah atau lembaga bentukan (semi) pemerintah seperti Komnas HAM (Ariandi,2001).

   b. Hibah untuk non-pemerintah (*government to private*)

      Hibah ini diberikan dan disalurkan langsung oleh pemerintah atau lembaga donor kepada lembaga-lembaga non pemerintah.

Persoalan yang sering muncul dalam kaitan ini adalah dimasukkannya alokasi hibah dalam lembaga-lembaga non-pemerintah (lembaga swadaya masyarakat) sebagai bagian dari bantuan pembagunana resmi negara donor atau *official development assistance* (ODA) kepada Indonesia yang berarti juga dimasukkan sebagai bagian dari *pledge* CGI.

Sementara pengelola hibah ini ditangani langsung oleh donor dan pemanfaatannya diserahkan sepenuhnya kepada lembaga atau organisasi penerima. Kesulitan yang dihadapi adalah bilamana pemerintah dituntut (khususnya oleh anggota Dewan Perwakilan Rakyat) untuk memberikan informasi yang rinci mengenai arah pembangunan hibah/pledge yang telah diterima. Terdapat anggapan bahwa seluruh hibah ODA yang diberikan adalah untuk pembiayaan program-program pemerintah yang tercatat dalam APBN. Padahal, kenyataanya tidaklah demikian, hibah tersebut bahan tidak "mampir" kedalam kas pemerintah. Lebih dari itu acapkali pihak donor nampak kurang terbuka dalam memberikan imformasi mengenai organisasi yang mendapat hibah, jumlah hibah yang diberikan dan peruntukannya (Ariandi,2001).

Pemberian bantuan luar negeri, tidak terlepas dari motivasi negara pemberi donor terhadap negara penerima donor. Menurut Alan Rix, ada beberapa motivasi negara donor dalam memberikan bantuannya, yaitu :

a. Motif kemanusiaan, yang bertujuan untuk mengurangi kemiskinan di Negara-Negara Berkembang melalui dukungan kerjasama ekonomi.
b. Motif politik yang memusatkan tujuan untuk meningkatkan image negara donor. Peralihan pujian menjadi tujuan dari pemberian bantuan luar negeri baik dari sektor politik domestic dan hubungan luar negara donor.
c. Motif keamanan nasional, yang mendasarkan pada asumsi bahwa bantuan luar negeri dapat menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang akan mendorong stabilitas politik dan akan memberikan keuntungan pada kepentingan negara donor. Dengan kata lain, motif keamanan nasional ini juga memiliki sisi ekonomi (Ariandi,2001).
d. Motif kepentingan nasional, yaitu motif yang berkaitan dengan kepentingan nasional negara donor (Ariandi,2001).

Bantuan luar negeri umumnya tidak ditujukan untuk kepentingan politik jangka pendek melainkan untuk prinsip-prinsip kemanusiaan atau pembangunan ekonomi jangka panjang. Dalam jangka panjang bantuan luar negeri dimaksudkan untuk membantu menjamin beberapa tujuan politik negara donor yang tidak dapat dicapai hanya melalui diplomasi, propaganda, atau kebijakan publik.

2.1.5 Pendidikan Tinggi dalam Kajian Hubungan Internasional

Hubungan internasional kontemporer tidak hanya memperhatikan hubungan politik antar negara saja tetapi juga sejumlah subyek lainnya seperti interdepensi ekonomi, hak asasi manusia, perubahan transnasional, organisasi

internasional, rezim internasional, pendidikan dan sebagainya (Perwita dan Yani 2005:143).

Konteks pendidikan dalam Hubungan Internasional yang dijelaskan dalam buku "Refleksi Teori Hubungan Internasional : dari Tradisional ke Kontemporer" yang ditulis oleh Asrudin dan Mirza Jaka Suryana tahun 2009.

> "Dalam beberapa waktu ini, fenomena hubungan internasional telah dan akan terus menunjukkan kompleksitas yang semakin tinggi. Hal ini ditunjukkan bukan saja pada semakin beragamnya aktor hubungan internasional yang saling berinteraksi (*the actors*), tetapi juga ditunjukkan dengan semakin bervariasinya isu (*the issues*) yang diperbincangkan dalam hubungan internasional serta semakin rumitnya proses interaksi (*the process*) seperti itu mengenai kemiskinan, pendidikan secara universal, kesetaraan gender dan memberdayakan perempuan, HIV/AIDS, malaria, dan penyakit lainnya, pembangunan lingkunan, dan kemitraan global untuk pembangunan yang terjadi antar berbagai aktor hubungan internasional" (Asrudin dan Suryana, 2009 : 34).

Seperti yang telah dijelaskan oleh peneliti di dalam latar belakang masalah. Fenomena hubungan internasional kini semakin mengarah pada persoalan sehari-hari penduduk dunia termasuk Indonesia, yaitu pendidikan salah satunya pendidikan tinggi. Karena pendidikan tinggi merupakan salah satu indikator penentu baik atau buruknya kualitas sumber daya manusia di sebuah negara. Dengan adanya sumber daya manusia yang berkualitas maka proses pembangunan dari sebuah negara akan berjalan dengan baik. Maka keberhasilan dalam memenuhi kebutuhan seperti pendidikan tinggi., sangat ditentukan oleh fenomena yang terjadi dalam perubahan sistem internasional.

Pendidikan tinggi dalam konteks Hubungan Internasional adalah bahwa sesuai dengan perkembangan jaman isu-isu yang d bahas oleh dunia internasional pun semakin berkembang. Pendidikan tinggi bukan hanya isu sebuah negara saja

namun sudah menjadi isu internasional. Semakin baik sebuah sistem pendidikan tinggi di sebuah negara maka akan semakin baik pula citra negara tersebut. Pendidikan tinggi merupakan salah satu indikator penentu kualitas sumber daya manusia sebuah negara.

Dengan adanya sumber daya manusia yang berkualitas maka proses pembangunan dari sebuah negara akan berjalan dengan baik. Maka keberhasilan dalam memenuhi kebutuhan pendidikan tinggi, sangat ditentukan oleh fenomena yang terjadi dalam perubahan sistem internasional (Asrudin dan Suryana, 2009 : 34).

Pendidikan secara kelembagaan sudah sejak lama dilakukan oleh negara-negara-negara di dunia. Ini menunjukkan sebuah hasil dari perkembangan menuju ke modernisasi produk sejarah dari tiga peristiwa penting dalam pusat Perang Dunia II. Pertama adalah kemunculan Amerika Serikat sebagai negara adidaya. Di tahun 1950-an Amerika Serikat memainkan tanggung jawab dalam mengatur dunia. Kedua ada sebuah penyebaran sekelompok pergerakan komunis dunia. Ketiga ada disintegrasi kerajaan kolonial Eropa di Asia, Afrika dan Amerika Latin memberikan kemerdekaan untuk negara baru di dunia.

Ketiga hal tersebut memberikan pandangan bahwa pendidikan memainkan peranan penting dalam upaya membangun kekuatan politik oleh negara yang memenangkan Perang Dunia ke II. Dimana pasca Perang Dunia ke II, negara-negara maju tidak lagi menggunakan konflik fisik untuk membangun kekuatan tapi lebih kepada pengembangan pendidikan dengan tujuan menghasilkan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dapat digunakan sebagai alat untuk melakukan

intervensi terhadap negara-negara lain. Hal ini jelas memperlihatkan bahwa pendidikan tidak dapat terlepas dari nuansa politik bahkan hal keagamaan seperti fatwa sekalipun tidak dapat berdiri sendiri tanpa politik (Salim & Azra, 2003: 168).

Pendidikan sebagai usaha sadar yang memerlukan tujuan, tanpa adanya tujuan maka pelaksanaan pendidikan tidak akan teratur. Tujuan pendidikan dijadikan sebagai sebuah pedoman dalam pelaksanaan proses pendidikan dan hasil yang diharapkan dalam proses pendidikan tersebut.

Hal ini merupakan kewajiban untuk pemerintah baik secara hukum ataupun politik dalam hal untuk menyediakan pendidikan dengan kualitas yang baik serta untuk melaksanakan dan memantau lebih efektif strategi pendidikan.

Pendidikan tinggi adalah sebuah alat yang ampuh dimana masyarakat yang terpinggirkan secara ekonomi dan sosial dapat mengangkat diri dari kemiskinan dan perpartisipasi sepenuhnya sebagai warga negara.

Pada tahun 2015 negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa menyepakati program *Sustainable Development Goals* (SDGs) memiliki 17 tujuan dan 165 sasaran pembangunan berkelanjutan yang telah dideklarasikan oleh 193 anggota PBB pada sidang umum ke 70. Dari 17 tujuan maka salah satunya tentang kualitas pendidikan di segala tingkatan termasuk pendidikan tinggi yang bersifat pembangunan berkelanjutan hingga tahun 2030 (SDGs Indonesia, 2015 melalui sdgsindonesia.or.id).

2.1.5.1 Pendidikan Tinggi

Undang-Undang Republik Indonesia nomor 12 tahun 2012 menjelaskan bahwa pendidikan tinggi adalah jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencakup program diploma, program sarjana, program magister, program doktor, dan program profesi, serta program spesialis, yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi berdasarkan kebudayaan bangsa Indonesia.

Fungsi pendidikan tinggi menurut UURI no.12 thn 2012 pasal 4 adalah:

a. Mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa;
b. Mengembangkan sivitas akademia yang inovatif, responsif, kreatif, terampil, berdaya saing, dan koorporatif melalui pelaksanaan Tridharma; dan
c. Mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora (KEMRISTEKDIKTI Republik Indonesia, 2015)

Pendidikan Tinggi bertujuan:

a. berkembangnya potensi mahasiswa agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, terampil, kompeten, dan berbudaya untuk kepentingan bangsa;
b. dihasilkannya lulusan yang menguasai cabang ilmu pengetahuan dan/atau teknologi untuk memenuhi kepentingan nasional dan peningkatan daya saing bangsa;

c. dihasilkannya ilmu pengetahuan dan teknologi melalui penelitian yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora agar bermanfaat bagi kemajuan bangsa, serta kemajuan peradaban dan kesejahteraan umat manusia; dan
d. Terwujudnya pengabdian kepada masyarakat berbasis penalaran dan karya penelitian yang bermanfaat dalam memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa (KEMRISTEKDIKTI Republik Indonesia, 2015).

Standar Nasional Pendidikan Tinggi adalah satuan standar yang meliputi standar nasional pendidikan, ditambah dengan standa nasional penelitian, dan standar nasional pengabdian kepada masyarakat (Rusmini,2011:10).

Standar Nasional Pendidikan Tinggi bertujuan:

a. Menjamin tercapainya tujuan pendidikan tinggi yang berperan strategis dalam mencerdaskan kehidupan bangsa, memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menerapkan nilai humaniora serta pembudayaan bangsa Indonesia yang berkelanjutan;
b. Menjamin agar pembelajaran pada program studi, penelitian, dan pegabdian kepada masyarakat yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia. Mencapai mutu sesuai dengan kriteria yang ditetapkan dalam Standar Nasional Pendidikan Tinggi; dan
c. Mendorong agar perguruan tinggi diseluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia mrncapai mutu pembelajaran, penelitian, dan

pengabdian masyarakat melalui kriteria yang ditetapkan dalam Standar Nasional Pendidikan Tinggi secara berkelanjutan (Rusmini,2011:10).

Standar Nasional Pendidikan (SNP) yang ditetapkan, pada dasarnya memacu pengelola pendidikan, para dosen, karyawan dan masyarakat untuk lebih serius membenahi pendidikan. Persoalannya ditengah tuntutan pada era globalisasi pendidikan, justru kita tengah menghadapi kesulitan dalam pemenuhan sumber belajar, SDM dosen dan karyawan, mutu *output/outcome* pendidikan, pembiayaan pendidikan, kompetensi dosen, lemahnya sistem rekrutmen, bahkan SDM pimpinan. Kenyataan ini semua, turut mempersulit lembaga pendidikan tinggi untuk melakukan inovasi, pembaharuan dan pengembangan menjadi perguruan tinggi yang berprestasi (Rusmini,2011:10).

2.1.5.2 Kualitas Pendidikan Tinggi

Kualitas perguruan tinggi adalah sikap yang dihasilkan dari persepsi mahasiswa tentang kinerja layanan pendidikan tinggi tersebut. Sebagaimana diketahui, produk pendidikan tinggi dalam melayani mahasiswa adalah pengajaran, penelitian, dan pengabdian pada masyarakat (Holdford dan Reinders, 2001: 125).

Indikator yang mempengaruhi kualitas pendidikan adalah standar kualitas pendidikan menurut RISTEK-DIKTI yang terdiri dari 10 indikator antara lain proses pembelajaran, kurikulum program studi, sumber daya manusia, kemahasiswaan, prasarana dan sarana, suasana akademik, keuangan, penelitian

dan publikasi, pengabdian pada masyarakat dan tata kelola (Singgih & Rahmayanti :C-134).

1. Proses pembelajaran

Dalam mengembangkan suatu proses pembelajaran dapat dipertimbangkan hal-hal berikut :

a. Pembelajaran tidak hanya difokuskan pada pengembangan intelektualitas mahasiswa sesuai disiplin ilmu, namun perlu diimbangi dengan pengembangan *soft skill* mahasiswa
b. Adanya objektivitas dan sistem evaluasi hasil studi yang transparan didukung dengan adanya umpan balik dari dosen mengenai hasil evaluasi itu sendiri.
c. Proses pembelajaran sebaiknya merupakan proses dua arah yang melibatkan komponen dosen dan mahasiswa sehingga ada timbal balik dalam transfer ilmu pengetahuan antara keduanya.

2. Kurikulum Program Studi

Kurikulum yang dimiliki suatu institusi pendidikan hendaknya mampu memenuhi kebutuhan dunia kerja saat ini dan yang akan datang. Semakin dekat kurikulum institusi dengan kebutuhan dunia kerja, maka kualitas lulusan akan semakin baik. Berikut ini adalah beberapa hal yang harus diperhatikan agar institusi pendidikan mampu menyusun kurikulum yang baik :

a. Kurikulum disusun dan dievaluasi secara berkelanjutan mengingat kebutuhan dunia kerja yang dinamis. Dalam hal ini pihak institusi diharapkan memiliki responsifitas yang tinggi.

b. Kurikulum disusun berbasis kompetensi dan selalu *up date*
c. Kurikulum yang disusun mampu menghasilkan lulusan yang bertanggung jawab terhadap kemajuan bangsa dan senantiasa ingin mengembangkan keilmuan yang dimiliki.

3. Sumber Daya Manusia

Berikut adalah beberapa hal yang kiranya dapat diperhatikan berkaitan dengan sumber daya manusia:

Dosen :

a. Sistem rekrutmen dan pengembangan dosen disesuaikan dengan kebutuhan kurikulum baik untuk kualifikasi terutama *soft skill* yang dimiliki.
b. Mampu menyusun program pembelajaran yang berkelanjutan, rasional dan relevan dengan kebutuhan dunia industri secara *up date*
c. Adanya promosi dosen yang dilakukan secara objektif berdasarkan prestasi dan pengabdian baik dari sisi pengajaran, penelitian dan publikasi, serta pengabdian kepada masyarakat.
d. Adanya *job description* yang jelas meliputi materi pembelajaran dan beban kerja.

Karyawan :

a. Sistem rekrutmen dan pengembangan karyawan disesuaikan dengan kebutuhan pelaksanaan program pembelajaran baik untuk kualifikasi, terutama soft skill yang dimiliki.

b. Adanya promosi karyawan yang dilakukan secara objektif berdasarkan prestasi dan pengabdian.
c. Adanya *job description* yang jelas meliputi tugas dan pekerjaan yang harus dilaksanakan beikut beban kerja

4. Kemahasiswaan

Berikut terdapat beberapa hal yang dapat dipertimbangkan untuk mendukung kegiatan kemahasiswaan antara lain :

a. Pihak institusi sedapat mungkin mendorong mahasiswa untuk memiliki peranan dalam satu atau lebih organisasi kemahasiswaan.
b. Menyediakan fasilitas pendukung kegiatan ekstrakurikuler seperti ruangan tenaga pendidik/pelatih dan peralatan.
c. Kegiatan kemahasiswaan yang dilakukan hendaknya. Mampu meningkatkan kompetensi lulusan.
d. Pihak institusi secara aktif menjalin kerja sama dengan pihak industri (perusahaan) dalam memberikan dukungan dana maupun untuk kegiatan magang mahasiswa.

5. Prasaran dan Sarana

Beberapa hal yang dapat dijadikan masukan antara lain :

a. Pihak institusi memiliki prioritas pengembangan prasarana dan sarana sesuai target capaian yang dimiliki.
b. Adanya tanggung jawab bersama seluruh sivitas akademika terhadap pemeliharaan prasarana dan sarana.

c. Prasarana dan sarana yang disediakan harus dapat diakses oleh seluruh sivitas akademika.
d. Prasarana dan sarana yang dimiliki hendaknya memenuhi persayaratan teknis baik dari segi luas (bangunan), jumlah, kualitas dan kontinuitas pemeliharaannya.

6. Suasana Akademik

Berikut beberapa hal yang dapat dipertimbangkan dalam menciptakan suasana akademik yang mendukung:

a. Adanya perencanaan pemenuhan kebutuhan sarana dan alokasi dana dalam rangka mendukung terciptanya suasana akademik yang dibutuhkan.
b. Civitas akademika hendaknya memiliki tanggung jawab yang sama dalam menciptakan suasana proses pembelajaran yang harmonis, nyaman, saling menghargai dan saling menghormati sehingga tercipta suasana pembelajaran yang mendukung.
c. Adanya kebijakan untuk memberikan penghargaan dan sanksi agar masing-masing civitas akademika memiliki tanggung jawab yang besar untuk bersama-sama menciptakan suasana yang nyaman dan mendukung proses pembelajaran.

7. Keuangan

Faktor ini melibatkan pihak internal manajemen institusi terkait dengan biaya yang dibutuhkan untuk dapat menyelenggarakan pembelajaran yang bermutu disisi lain juga tingginya biaya yang dibutuhkan mengakibatkan

mahasiswa atau calon mahasiswa akan menanggung biaya pendidikan yang tinggi pula. Beberapa masukan yang dapat diberikan antara lain :

a. Penetapan besar biaya pendidikan yang harus dikeluarkan mahasiswa harus berada dalam batas kewajaran dan memperhatikan faktor kebutuhan.
b. Adanya evaluasi secara berkala terhadap besaran biaya pendidikan yang harus dikeluarkan mahasiswa.
c. Pihak institusi mengembangkan kerja sama saling menguntungkan dengan pihak industri untuk mendukung pembiayaan pendidikan.
d. Pengalokasian dana sebaiknya disesuaikan dengan prioritas kebutuhan dan berorientasi pada peningkatan mutu.
e. Adanya pertanggungjawaban pengunaan dana secara berkala.

8. Penelitian dan Publikasi

Beberapa hal yang dapat dipertimbangkan untuk menghasilkan penelitian dan publikasi yang optimal baik dari segi jumlah maupun kualitas adalah:

a. Penelitian sebaiknya lebih banyak melibatkan mahasiswa.
b. Penelitian yang dilakukan harus memenuhi standar mutu baik untuk tingkat nasional maupun internasional.
c. Hasil penelitian mampu mendukung pengembangan ilmu pengetahuan, mendukung kebijakan pemerintah dan memperkaya kasanah keilmuan dunia pendidikan.
d. Pihak institusi mendorong dilakukannya penelitian baik dari segi jumlah maupun kualitas penelitian itu sendiri secara berkelanjutan.

e. Adanya penghargaan bagi peneliti baik berdasarkan cakupan penelitian maupun jumlah dan kualitas penelitian.
f. Menjalin kerja sama dengan dunia industri baik dalam hal pendanaan maupun objek penelitian.
g. Hasil penelitian dipublikasikan dan dapat diakses secara luas oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan.
h. Menjalin kerja sama baik antar jurusan maupun dengan pihak institusi lain untuk dapat menghasilkan penelitian yang semakin berkualitas.

9. Pengabdian pada Masayarakat

Pengabdian kepada masyarakat dilakukan sebagai bentuk tanggung jawab sosial suatu institusi pendidikan terhadap masyarakat. Agar pengabdian masyarakat dapat dilakukan dengan baik, dapat diperhatikan beberapa hal berikut:

a. Kegiatan ini sebaiknya dilakukan dengan dasar memberikan manfaat secara luas terhadap masyarakat mengembangkan dan memanfaatkan ilmu pengetahuan yang dimiliki.
b. Pengabdian pada masyarakat hendaknya mampu memberikan umpan balik untuk kepentingan institusi baik untuk proses pembelajaran maupun penelitian-penelitian yang dilakukan.
c. Pengabdian pada masyarakat harus berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat salah satunya dengan menciptakan produk tepat guna dan menyelesaikan permasalahan yang sedang berkembang.

10. Tata Kelola

Beberapa hal yang dapat dijadikan bahan pertimbangan terkait dengan sistem tata kelola suatu institusi pendidikan adalah :

a. Pimpinan institusi dan pimpinan level di bawahnya mutlak harus memiliki kemampuan *leadership* dan kemampuan pendukung lainnya.
b. Adanya kejelasan wewenang dan tanggung jawab tiap jabatan dalam institusi pendidikan.
c. Kepemimpinan dievaluasi secara berkala dalam hal pencapaian visi, misi dan tujuan suatu institusi pendidikan.
d. Adanya dasar yang jelas dalam berkomitmen terhadap institusi.
e. Sivitas akademika khususnya pejabat institusi memiliki tanggung jawab yang sama dalam menciptakan nuasana pembelajaran yang kondusif secara psikis.
f. Pimpinan mampu memotivasi orang-orang yang dipimpin untuk selalu bekerja dengan berorientasi pada visi, misi dan tujuan institusi.
g. Adanya sistem *reward* dan *punishment* untuk mendorong kinerja yang lebih baik (Singgih & Rahmayanti, 2008 :C-139 - C-140).

2.1.5.3 Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi

Secara umum yang dimaksud dengan penjaminan mutu adalah proses penetapan dan pemenuhan standar pengelolaan secara konsisten dan berkelanjutan sehingga konsumen, produsen dan pihak lain yang berkepentingan memperoleh kepuasan. Dengan demikian penjaminan mutu perguruan tinggi adalah proses

penetapan dan pemenuhan standar pengelolaan pendidikan tinggi secara konsisten dan berkelanjutan, sehingga *stakeholders* memperoleh kepuasan

Bidang Akademik Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi mengatakan bahwa standar dibutuhkan oleh perguruan tinggi sebagai acuan dasar dalam rangka mewujudkan visi dan menjalankan misinya. Acuan dasar tersebut antara lain meliputi kriteria dan kriteria minimal dari berbagai aspek yang terkait dengan penyelenggaraan pendidikan tinggi. Selain itu, standar juga dimaksudkan memacu perguruan tinggi agar dapat meningkatkan kinerjanya dalam memberikan layanan yang bermutu dan sebagai perangkat untuk mendorong terwujudnya transparansi dan akuntabilitas publik dalam penyelenggaraan tugas pokonya. Standar mutu juga merupakan kompetensi/kualitas minimum yang dituntut dari lulusan perguruan tinggi terkait, yang dapat diukur dan dapat diuraikan menjadi parameter dan indikator (DIKTI, 2006:12).

Sistem penjaminan mutu perguruan Tinggi dilakukan atas dasar penjaminan mutu internal, penjaminan mutu eksternal, dan perijinan penyelenggaraan program.

1. Penjaminan Mutu Internal

   Penjaminan mutu internal adalah penjaminan mutu yang dilakukan oleh institusi perguruan tinggi dengan cara yang ditetapkan perguruan tinggi pelaksana. Parameter dan metoda mengukur hasil ditetapkan oleh perguruan tinggi sesuai visi dan misinya. Dengan menjalankan penjaminan mutu internal maka institusi pendidikan tinggi sebaiknya melakukan evaluasi internal disebut evaluasi diri secara berkala. Evaluasi diri

dimaksudkan untuk mengupayakan peningkatan kualitas berkelanjutan. Sistem penjaminan mutu internal disebut SPM-PT.

2. Penjaminan Mutu Eksternal

   Penjaminan mutu eksternal adalah penjaminan mutu yang di lakukan oleh badan akreditasi seperti (BAN-PT) atau lembaga lain dengan cara yang ditetapkan oleh lembaga akreditasi yang melakukan. Parameter dan metoda mengukur hasil ditetapkan oleh lembaga akreditasi yang melakukannya. Lembaga akreditasi mewakili masyarakat sehingga sifatnya mandiri. Akreditasi oleh lembaga akreditasi dimaksudkan untuk melakukan evaluasi eksternal untuk menilai kelayakan program, akreditasi juga dimaksudkan untuk pemberian saran peningkatan dalam mengupayakan peningkatan kualitas berkelanjutan. Penjaminan mutu eksternal selanjutnya disebut akreditasi.

3. Perijinan Penyelenggraan Program

   Perijinan peyelenggaraan program diberikan oleh KEMRISTEKDIKTI untuk satuan pendidikan yang memenuhi syarat penyelenggaraan program pendidikan. Tata cara dan parameter yang dilakukan ditetapkan oleh KEMRISTEKDIKTI sesuai ketentuan yang ada. Perijinan selain dimaksudkan sebagai evaluasi eksternal juga untuk menilai kelayakan kepatuhan penyelenggaraan program.

Dengan demikian, penjaminan mutu perguruan tinggi secara keseluruhan dimaksudkan untuk melakukan peningkatan kualitas institusi pendidikan tinggi secara berkelanjutan.

2.1 Kerangka Pemikiran

Kerjasama antara Indonesia dan Amerika Serikat merupakan suatu bentuk interaksi antar aktor yang melewati batas-batas negara. Kerjasama internasional dapat terbentuk karena kehidupan internasional meliputi berbagai bidang seperti ideologi, politik, ekonomi, sosial, lingkungan hidup, kebudayaan, pertahanan, keamanan. Hal tersebut memunculkan kepentingan yang beragam sehingga beberapa negara membentuk kerjasama internasional. Kerjasama antara Indonesia dan Amerika Serikat terbentuk pada tahun 1949, dalam perkembangannya Indonesia dan Amerika Serikat sudah melakukan banyak kerjasama di bidang, ekonomi, politik, sosial, bahkan pendidikan. Salah satu hasil dari komitmen kerjasama jangka panjang Amerika Serikat dan Indonesia dapat dilihat dari Amerika Serikat yang menyediakan bantuan pembangunan melalui *United states Agency for International Development (*USAID*)*. Dalam hal ini Amerika Serikat melalui USAID memberikan peranan nasional yang termasuk dalam peranan *Developer*, *United State Agency For Internasional Development* (USAID) merupakan sebuah lembaga pemerintahan federal Amerika Serikat yang diresmikan oleh John F. Kennedy sebagai bagian dari undang-undang tentang bantuan luar negeri Amerika tahun 1961. Bahkan wujud bantuan USAID dilandaskan pada Kemitraan Komprehensif antara Indonesia-Amerika Serikat pada tahun 2010.

Bantuan luar negeri merupakan inovasi politik di abad dua puluh. Belum pernah ada sebelumnya dimana negara-negara kaya menyalurkan sumber daya finansial mereka ke negara-negara miskin, secara unilateral dan tanpa saling balas.

Pasca Perang Dunia II, bantuan luar negeri telah menjadi alat yang digunakan oleh aktor negara dalam menjalankan hubungan luar negerinya.

Bantuan luar negeri Amerika Serikat melalui USAID merupakan salah satu instrumen kebijakan yang sering digunakan dalam hubungan luar negeri. Secara umum bantuan luar negeri Amerika Serikat melalui *United State Agency For International Development* (USAID) merupakan transfer sumber daya dari satu pemerintah ke pemerintah lain yang dapat berbentuk dana, barang maupun nasehat teknis.

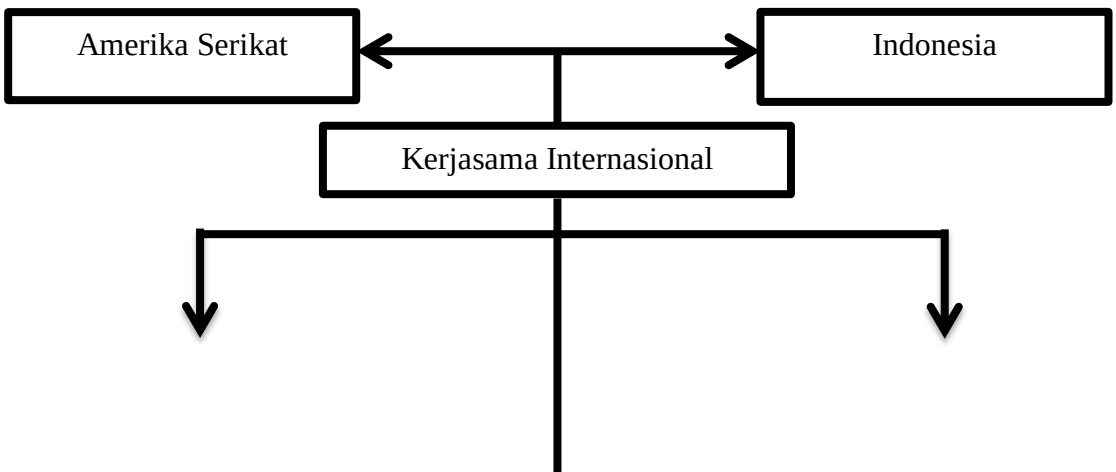
USAID pertama kali menjalankan misinya di Indonesia pada akhir tahun 1961 untuk membantu pemerintah mengatasi masalah perkembangan penduduk di Indonesia yang semakin meningkat dan beberapa kali memberikan bantuan kemanusiaan untuk Indonesia seperti saat terjadinya Tsunami di Aceh dan membantu gempa di wilayah Jawa Tengah. Hingga pada tahun 2000-an kerjasama Indonesia dan USAID diwujudkan kembali melalui kerjasama Indonesia dan Amerika Serikat dalam suatu kemitraan komperhensif (*Compherenshive Partnership*) yang ditandatangani oleh Presiden Obama dan Yudhoyono pada tahun 2010 untuk memperluas, memperdalam dan meningkatkan hubungan bilateral antara kedua negara.

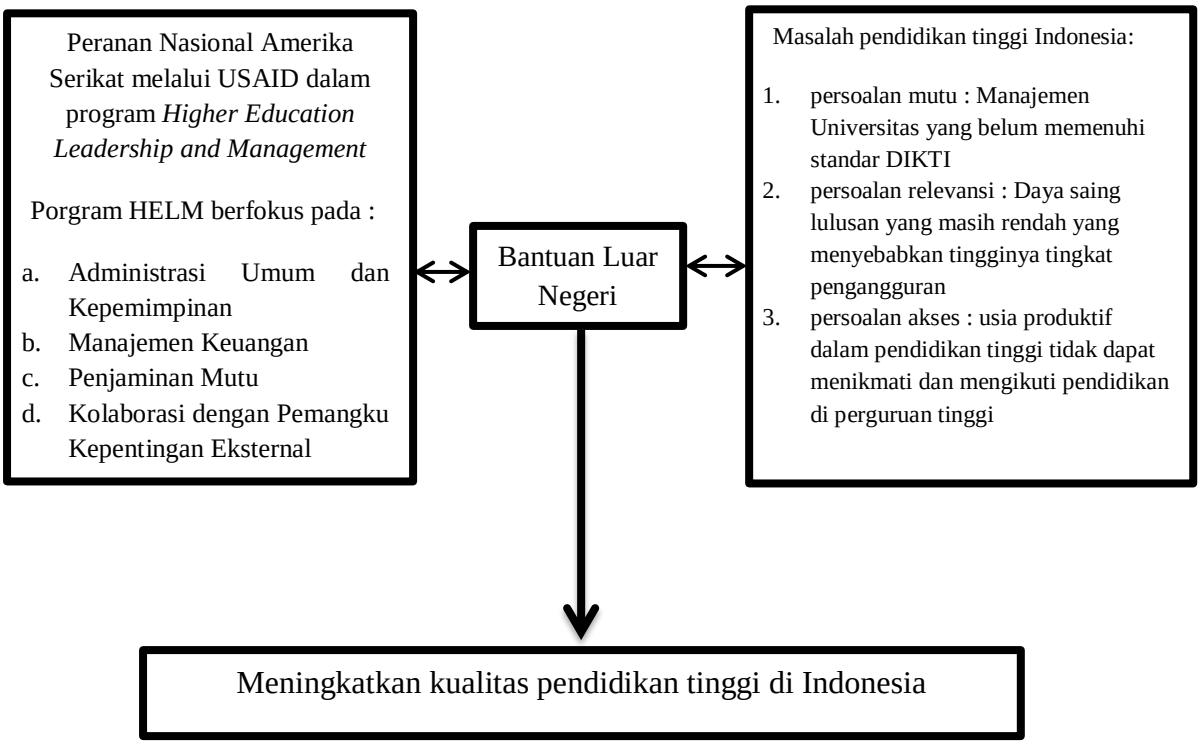
Amerika Serikat sebagai negara donor melalui USAID telah memberikan banyak bantuan dana dalam berbagai bidang pembangunan di Indonesia, menariknya USAID memfokuskan bantuannya dalam bidang pendidikan tinggi Indonesia.

Dalam Hubungan Internasional pendidikan tinggi merupakan salah satu isu yang dibahas dalam dunia Internasional, dimana pendidikan tinggi merupakan sebuah entitas sebuah bangsa, tingkat pendidikan tinggi yang baik akan menngktkan *bargaining position* sebuah negara Pendidikan tinggi Indonesia mengalami penurunan kualitas dari tahun ketahun, RISTEK-DIKTI mengatakan dari berbagai standar yang yang dikeluarkan oleh RISTEK-DIKTI baru sedikit perguruan tinggi negeri yang mencapai standar yang sudah ditetapkan, selain itu penurunan kualitas pedidikan tinggi di Indonesia juga diperlihatkan dengan jumlah perguruan tinggi Indonesia yang dapat bersaing di dunia Internasional.

USAID bekerjasama dengan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (KEMRITEKDIKTI) bertujuan meningkatkan kualitas Pendidikan Tinggi di Indonesia melalui Program *Higher Education Leadership and Management.* USAID HELM merangkul perguruan tinggi Indonesia, melakukan pelatihan, pembelajaran, dan berbagai bentuk lainnya dalam lingkup pilar manajemen, untuk meningkatkan kualitas pendidikan tinggi Indonesia.

Secara lebih rinci kerangka pemikiran akan digambarkan dalam bentuk bagan seperti berikut:





Gambar 2.1
Gambar Kerangka Pemikiran